

**INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH  
SERENTAK**

*(Studi Kasus : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Marcellino Geovani

NIM : 401.14.11.063

Program Peminatan : Tata Negara

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marcellino Geovani

NIM : 401.14.11.063

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**Independensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak (*Studi Kasus: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat*)**. Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



Marcellino Geovani

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH  
SERENTAK**

*(Studi Kasus : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat)*

**Skripsi**

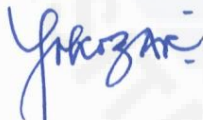
Oleh:

Marcellino Geovani  
NIM. 401.14.11.063  
Konsentrasi : Tata Negara

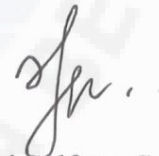
Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H., M.H.)  
NP. 606206003



(Reko Dwi Salfutra S.H., M.H.)  
NIP. 19850412201404100

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum**



(Dr. Derita Prapti. Rahayu, S.H., M.H.)  
NIP. 19802172014042001

## HALAMAN PENGESAHAN

# DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG (Studi Putusan Nomor.226/Pid.B-LH/2018/PN Pgp, Dan Nomor.203/Pid.B- LH/2018/PN Pgp)

## SKRIPSI

### Oleh:

Inpensyah Harianja  
NIM. 4011411053  
Program Peminatan : Hukum Pidana

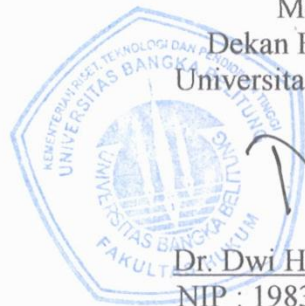
Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 13 Agustus 2019  
Dan dinyatakan LULUS


### Majelis Penguji

1. Ketua : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H  
NIP. 198307172012121004
2. Sekertaris : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H  
NP. 608410029
3. Anggota I : Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.Hum.  
NP. 607308015
4. Anggota II : Reko Dwi Salfutra , S.H.,M.H.  
NIP. 1985044122014041002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



  
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NIP : 198307172012121004



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Tak ada seorangpun yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kerja keras, Masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan menunda".

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

- Untuk kedua orang tua ku, Alm Papaku tercinta Matheus Manafe dan Mamaku tersayang Magdalena, terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tulus sekaligus penyemangat hidupku, terimakasih telah menjadi Papa sekaligus Mama yang luar biasa untukku.
- Untuk kakak ku tersayang Leris Efronda, Fiddo Manafe, dan Lusye Chrisnaya, terimakasih selalu memberikan support dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk sahabat-sahabatku terbaik (Inda, Chindra, Elak, dan Husna) terimakasih selalu ada disaat suka maupun duka.

## **ABSTRAK**

**Marcellino Geovani**

# **INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK**

*(Studi Kasus : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat)*

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Independensi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Pemilukada.

Independen dikenal dengan adanya kebebasan bagi penyelenggara negara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia, KPUD merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen. Dimana KPUD memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemilu pada setiap tahapannya untuk melaksanakan pemilu secara damai dan aman. Dikarenakan Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk mengawal proses jalannya pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga proses penghitungan suara dan penentuan hasil pemilu. Independensi KPU dalam hal ini sangat dijunjung tinggi mengingat KPUD merupakan penyelenggara pemilu yang harus dituntut untuk independen dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan wewenangnya dalam pemilihan umum. Mengingat independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting agar dalam pelaksanaan pemilu dapat dilakukan secara adil dan lancar bahkan dapat menciptakan pemilu yang berintegritas berdasarkan prinsip demokrasi. Melihat persoalan tersebut maka diharapkan kedepan KPUD dapat bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara adil, lancar dan juga mempunyai integritas yang kuat, jujur, komitmen, dedikasi terhadap suksesnya pemilu serta bertindak secara profesional demi tegaknya demokrasi dan keadilan.

## *Abstract*

**Marcellino Geovani**

**INDEPENDENCE OF THE REGIONAL GENERAL ELECTION  
COMMISSION OF WEST BANGKA REGENCY IN THE  
IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS  
REGIONAL HEAD ELECTIONS**

*(Case Study: Regional General Election Commission of West Bangka Regency)*

Research Paper, Faculty of Laws 2019

Keywords: Independence, Regional General Election Commission, General Election.

*Independent is known as having the freedom to regulate the state from the authorities and the ruling party, the ruling party, the ruling party and any party in the decision making and parties involved in the election. In Indonesia, KPUD is a state institution that remains national, permanent, independent and independent. Where the KPUD has full responsibility for the implementation of general elections at each stage for the implementation of peaceful and safe elections. Because this Commission is not only related to the political parties participating in the election, but also has to deal directly with the government and the wider community to guard the process of the election starting from preparation, organizing to the process of counting the votes and election results. The independence of the KPU in this matter is highly respected, considering that KPUD is an election organizer that must be required to be independent in carrying out its duties, duties and authority in general election. Taking the independence of the EMB important to carry out elections can be done fairly and easily can create elections with integrity based on democratic principles. Seeing this, it is hoped that in the future KPUD can be responsible for the implementation of elections fairly, safely and also have strong integrity, honesty, commitment, dedication to the success of the election and supporting professionals to promote democracy and prosperity.*



## **KATA PENGANTAR**

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul Independensi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak.

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Sc selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan dosen pembimbing utama yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yokotani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H. selaku dosen pendamping yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
5. Para Dosen- dosen ku tercinta yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bagian BAK Fakultas Hukum yang telah membantu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan selama perkuliahan.
7. Bagian Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang selalu membantu ketika mencari buku yang diperlukan untuk keperluan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jadi kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tiada henti-hentinya.

Balunujuk, 01 Agustus 2019

Marcellino Geovani



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH, PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK</b>	
A. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum.....	18
1. Definisi Komisi Pemilihan Umum .....	18
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	24
3. Dinamika Komisi Pemilihan Umum .....	25

4. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum .....	28
B. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum Daerah .....	30
C. Tinjauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak.....	38
D. Struktur Organisasi KPU .....	41
<b>BAB III INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK</b>	
A. Independensi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangka Bangka Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak .....	46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independen KPUD Kabupaten Bangka Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	